

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Thailand melakukan upaya penanganan masalah perdagangan manusia dikarenakan permasalahan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya. Membuat pemerintah Thailand sadar akan urgensi isu perdagangan manusia tersebut. Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha (Purn.), juga menegaskan komitmen politiknya dalam memberantas perdagangan manusia pada berbagai kesempatan. Memerangi perdagangan manusia sebagai bagian dari agenda reformasi Thailand. Thailand juga menyadari bahwa pentingnya melakukan kerja sama dengan pihak lain agar penanganan masalah perdagangan manusia berjalan dengan lebih efektif. Upaya yang dilakukan oleh Thailand dilihat melalui tiga indikator yang dijelaskan oleh Philip L. Riechel, yaitu landasan bersama, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi *networking*.

Berkaitan dengan mempromosikan kerja sama lintas batas negara, landasan bersama turut memiliki peranan penting sebagai bentuk suatu kerja sama bisa dilaksanakan. Dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, terdapat perbedaan perspektif yang apabila dapat menemukan kesamaan dapat dikembangkan menjadi kolaborasi dari berbagai pihak. Thailand dan negara-negara tetangga yang memahami permasalahan yang terjadi dan berdampak pada negaranya, melakukan inisiasi membentuk suatu komite pertemuan untuk membahas satu isu spesifik. COMMIT (The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking) merupakan suatu aliansi formal yang dipimpin pemerintah yang menggabungkan enam negara di wilayah sub-Mekong (Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) dalam memerangi perdagangan manusia. Proses COMMIT

dimulai pada tahun 2004 untuk menciptakan sistem kerja sama dan kolaborasi lintas batas yang berkelanjutan dan efektif untuk memerangi perdagangan manusia.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah membangun kepercayaan. COMMIT telah menyediakan forum untuk membangun kepercayaan dan keyakinan antara negara-negara dalam masalah perdagangan manusia, serta sistem yang efektif untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan bersama. COMMIT juga memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dan pemuda dalam pembuatan kebijakan regional, melalui *COMMIT CSO/Youth Platform*. Bentuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan bersama yang dilandasi kepercayaan negara-negara yang terlibat adalah berbagi data dan informasi.

Beberapa proyek kerja sama yang dilakukan Thailand adalah; pertama, kerja sama bilateral Thailand dan Myanmar dalam penuntutan. Pertemuan antara delegasi polisi Thailand dan polisi Myanmar menyediakan forum yang tepat waktu untuk pertukaran pandangan yang luas tentang kasus penuntutan, khususnya kasus perdagangan manusia di kapal penangkap ikan di provinsi Trang, Thailand. Kedua, kerja sama bilateral Thailand dan Laos PDR. Kedua belah pihak menyetujui untuk meningkatkan mekanisme di mana Thailand dan Laos dapat bertukar informasi untuk kepentingan penyelidikan. Kemudian, meningkatkan pengawasan di pos-pos pemeriksaan imigrasi, baik di pintu masuk maupun pintu keluar. Ketiga, kerja sama antara kementerian luar negeri dan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi dan bertukar pemikiran tentang pembentukan kebijakan, mempromosikan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah dan implementasi yang diambil, pertukaran praktik yang baik dan menerima rekomendasi.

Upaya terakhir yang dilakukan Thailand adalah *meningkatkan networking*. Meningkatkan networking dianggap penting untuk kerja sama lintas negara tidak hanya karena dapat memfasilitasi identifikasi keamaan dan membangun kepercayaan, tetapi juga karena hal itu penting dalam mencapai tujuan. Bahkan ketika situasi kerja sama secara formal dibentuk (di waktu yang sama kerja sama informal dapat membantu mempercepat proses formal karena orang-orang yang saling mengenal dapat menggunakan komunikasi secara personal untuk mendapatkan perkembangan dalam proses kerja sama formal.

Beberapa kerja sama secara formal terjalin antara Thailand dan pihak lain dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, pertama, program Australia-Asia untuk memerangi perdagangan manusia (AAPTIP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan respon peradilan pidana terhadap perdagangan orang (TIP) di ASEAN. Kedua, *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Kerja sama antara Divisi Anti-Perdagangan Manusia, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (DATIP/MSDHS) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menghasilkan proyek pengembangan untuk membantu korban perdagangan manusia di negara-negara Sub-Regional Mekong (CM4TIP). Ketiga, kerja sama dengan organisasi internasional. Kementerian Tenaga Kerja bermitra dengan ILO dan Delegasi EU untuk Thailand meluncurkan sebuah proyek, -Memerangi Bentuk Pekerjaan yang Tidak Dapat Diterima di Industri Perikanan dan Makanan Laut Thailand. Proyek 42 bulan ini didanai oleh UE dan ILO, bertujuan untuk mengatasi kondisi kerja yang mengingkari prinsip dan hak dasar di tempat kerja di industri penangkapan ikan dan makanan laut Thailand. Selanjutnya, *COMMIT Tenth Senior Officials Meeting* (SOM10) dan *Four Inter-Ministerial Meeting* (IMM4). Berdasarkan kesepakatan enam negara, SOM10 dan IMM4 berfokus pada meninjau

implementasi dan upaya di bawah proses COMMIT selama beberapa tahun terakhir dan seterusnya menetapkan tujuan masa depan untuk memerangi perdagangan manusia. SOM10 dan IMM4 diadakan dengan tujuan untuk memperkuat upaya anti-perdagangan manusia di wilayah sub-Mekong melalui proses COMMIT.

Terakhir, *REGIONAL COMMIT YOUTH FORUM 2015*. Perwakilan anak dari enam negara di kawasan Sub-Mekong bertemu dengan pemerintah untuk berbagi pandangan mereka tentang perdagangan manusia dan migrasi. Tema CYF untuk tahun 2015 berfokus pada peran kaum muda dalam mendukung secara aktif pelaksanaan Rencana Aksi Sub-Regional keempat (SPA-IV) oleh pemerintah. Para delegasi muda akan bertemu dengan para pejabat pemerintah dan menteri selama Pertemuan Pejabat Senior COMMIT dan Pertemuan Antar Menteri, untuk berbagi komitmen mereka sendiri untuk aksi lokal, mempresentasikan rekomendasi mereka, dan membuat kasus untuk dukungan pemerintah untuk kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh kaum muda.

5.2 Saran

Setelah mendapatkan hasil penelitian terkait upaya Thailand dalam menangani perdagangan manusia, peneliti dapat menyarankan beberapa rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia. Pertama, penguasaan bahasa sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, karena terdapat beberapa data yang justru disajikan dalam bahasa Thailand. Selanjutnya, jika ingin meneliti hal yang serupa dengan judul peneliti, akan lebih baik fokus terhadap satu kerja sama yang dilakukan Thailand dengan pihak lain baik kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional, LSM, dan sebagainya. Sehingga, dapat memberikan jawaban yang lebih spesifik terhadap pencapaian maupun tantangan yang dihadapi selama menjalankan proyek atau program bersama.